

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL PAJAK, DAN DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK TERHADAP DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

THE INFLUENCE OF LOCAL REVENUE, TAX REVENUE SHARING FUND, AND NON TAX REVENUE SHARING FUND ON DAU OF CITY AND REGENCY IN BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

Mona Patricia Sinambela, Abu Nizarudin, Muhammad Qomaruddin Ridwan*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunijuk, Merawang, Bangka Belitung, Indonesia. 33172
[*mqomaruddin@ubb.ac.id](mailto:mqomaruddin@ubb.ac.id)

disubmit: 17 Agustus 2025, direvisi: 11 Juni 2026, diterima: 18 Juni 2026

ABSTRAK

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pemerataan fiskal antar daerah. Namun, besaran DAU yang diterima suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskalnya, yang tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP). Ketiga komponen tersebut menjadi penentu celah fiskal yang menjadi dasar perhitungan DAU, sehingga penting untuk dipahami pengaruhnya secara empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh PAD, DBHP, dan DBHBP terhadap DAU Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan realisasi APBD tahun 2014–2023 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DBHP, dan DBHBP masing-masing berpengaruh negatif terhadap DAU, yang bermakna semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah maka semakin kecil DAU yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Temuan ini mengimplikasikan bahwa pemerintah pusat perlu menyempurnakan formula alokasi DAU agar lebih berkeadilan, sementara pemerintah daerah perlu didorong untuk mengoptimalkan sumber pendapatan mandiri tanpa disinsentif oleh pengurangan DAU yang tidak proporsional.

Kata kunci: Dana Alokasi Umum, kapasitas fiskal, pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah, retribusi daerah

ABSTRACT

The General Allocation Fund (Dana Alokasi Umum/DAU) serves as a strategic instrument for supporting regional autonomy and promoting fiscal equity across regions. However, the amount of DAU a region receives is heavily influenced by its fiscal capacity, as reflected in Local Revenue (PAD), Tax Revenue Sharing Funds (DBHP), and Non-Tax Revenue Sharing Funds (DBHBP). These three components determine the fiscal gap underlying DAU calculations, making it essential to empirically understand their influence. This study aims to examine and analyze the effect of PAD, DBHP, and DBHBP on DAU across regencies and cities in Bangka Belitung Islands Province. Using a quantitative approach, the study processes secondary data from the 2014–2023 regional budget realization reports (APBD), obtained from the Directorate General of Fiscal Balance, and analyzed using multiple linear regression. The results show

Sinambela, M.P., A. Nizarudin, M. Q. Ridwan (2026). JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah, 10(01), page 30 – 44. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i1.385>

© The Author(s)



Published by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

that PAD, DBHP, and DBHBP each exert a negative effect on DAU, meaning that higher fiscal capacity leads to lower DAU allocations from the central government. These findings imply that the central government should refine the DAU allocation formula to better reflect fiscal fairness, while regional governments should be encouraged to optimize own-source revenues without being disincentivized by disproportionate reductions in DAU transfers.

Keywords: *Fiscal Capacity, Local Tax, General Allocation Funds, Local Retribution, Local Revenue,*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah menjadi komponen penting pada sistem pemerintahan di Indonesia yang dibangun pasca reformasi 1998 (Halim, 2013). Kebijakan ini memberikan otoritas kepada pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan, termasuk di bidang keuangan. Pelaksanaan pemerintahan Indonesia dimuat pada UU Nomor 23 Tahun 2014. Landasan hukum tersebut mengatur pembagian tugas pemerintahan dalam tata kelola pemerintahan yang terdesentralisasi. Selain itu, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mengatur pemberian dana transfer, pengelolaan dana transfer, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melaksanakan pembiayaan daerah, serta pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Desentralisasi fiskal dapat terwujud dengan bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) (Alexeev & Mamedov, 2017). DAU adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, dengan jumlah yang dihitung berdasarkan suatu rumusan yang disusun dengan

mempertimpangkan aspek kebutuhan dan kemampuan daerah dalam proses perumusannya (Halim, 2013).

Ditinjau dari UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 maka faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan DAU yaitu PAD, DBHP, dan DBHBP. Melalui ketentuan hukum yang tersebut, dapat disimpulkan bahwa daerah yang mengalami peningkatan dalam PAD, DBHP, dan DBHBP akan mengalami penguatan kapasitas fiskal sehingga mendorong pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan terhadap alokasi DAU ke daerah yang bersangkutan.

Meskipun demikian, daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang meningkat juga membutuhkan anggaran yang besar, termasuk untuk proyek pembangunan dan pelayanan publik lainnya (Chowdhury & Murshed, 2016). Dalam praktiknya, tidak semua daerah mampu mengoptimalkan PAD, DBHP, dan DBHBP secara maksimal (Rahmadoni et al., 2022). Hal ini dapat menimbulkan ketergantungan fiskal terhadap DAU serta memicu fenomena *flypaper effect* (Rahmasari et al., 2024). *Flypaper effect* adalah kondisi ketika dana transfer lebih

besar dimanfaatkan dibandingkan mendorong kemandirian PAD (Citra & Jatmiko, 2017).

Kondisi tersebut juga terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Nasrun & Handayani, 2024). Meskipun dikenal sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia, potensi tersebut belum sepenuhnya menjadi kekuatan fiskal yang merata di seluruh wilayah (Meidina et al., 2018). Berdasarkan data rata-rata dari tahun 2014-2023 yang ditunjukkan Tabel 1, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih tergolong rendah di sebagian besar Kabupaten/Kota pada Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa daerah seperti Kabupaten Bangka Selatan hanya memiliki PAD sebesar 6,54%, sementara DAU mencapai 53,89% dari total penerimaan (DJPK, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer masih relatif tinggi.

Tabel 1. Persentase PAD, DBHP, DBHBP, dan DAU Pemerintah Daerah Tk II Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PEMDA	PAD	DBHP	DBHBP	DAU
Bangka	13,23%	6,25%	9,87%	45,17%
Bangka Barat	7,55%	3,86%	9,26%	51,16%
Bangka Tengah	9,77%	2,67%	7,33%	50,00%
Bangka Selatan	6,54%	2,86%	9,25%	53,89%
Belitung	16,96%	2,40%	6,33%	48,22%
Belitung Timur	12,67%	3,12%	8,68%	53,28%
Pangkal Pinang	17,48%	2,71%	5,19%	48,63%

Sumber: DJPK 2025

DBHP menunjukkan kontribusi yang kecil di sebagian besar daerah. Salah satunya, yaitu Kabupaten Belitung hanya tercatat 2,40% (DJPK, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa basis perpajakan daerah masih terbatas dan belum menjadi sumber andalan fiskal daerah. Adapun DBHBP yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan timah memberikan kontribusi yang lebih signifikan, terutama di daerah seperti Bangka dan Bangka Barat (DJPK, 2025). Namun, karena sifatnya fluktuatif dan sangat bergantung pada harga komoditas global serta regulasi pemerintah maka DBHBP tidak dapat dijadikan sumber pendapatan yang stabil dan jangka panjang.

Berdasarkan fenomena ini, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pengaruh PAD, DBHP, dan DBHBP terhadap DAU yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketiga variabel tersebut memengaruhi besaran DAU, serta sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adil, transparan, dan berbasis potensi lokal.

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan beberapa temuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan daerah. Misalnya, (Fatimah et al., 2020) yang

menyatakan bahwa PAD dan DAU merupakan faktor yang mempengaruhi belanja daerah, tetapi DBH tidak mempengaruhi belanja daerah. Selanjutnya, (Ridho, 2021) menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif pada ketimpangan pendapatan sedangkan DBHP tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian, temuan empiris oleh (Istiqomah & Ismanto, 2025) mengindikasikan bahwa PAD berdampak pada kinerja keuangan daerah dan dana perimbangan tidak memberikan dampak terhadap kinerja keuangan daerah.

Meninjau hasil penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh PAD, DBHP, DBHBP terhadap penerimaan DAU masih sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut terkait untuk memahami hubungan antar variabel ini secara mendalam. Menggunakan *fiscal federalism theory* (Musgrave & Musgrave, 2012) sebagai landasan teoritis penelitian ini akan menguji pengaruh PAD, DBH-P, dan DBH-BP terhadap DAU. Teori ini relevan menjelaskan bagaimana desentralisasi fiskal memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, serta bagaimana peran pemerintah pusat dalam menyediakan transfer dana untuk menutupi ketimpangan fiskal antar wilayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen secara statistik. Penelitian ini dilaksanakan pada tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan. Rentang waktu penelitian mencakup periode 2014 hingga 2023, yakni selama sepuluh tahun anggaran.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Adapun kriteria yang ditetapkan adalah: (1) merupakan Kabupaten/Kota yang secara administratif berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan (2) memiliki data laporan realisasi APBD yang tersedia secara lengkap selama periode 2014–2023. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 7 Kabupaten/Kota dengan total 70 unit observasi.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia

(djpk.kemenkeu.go.id). Data yang dikumpulkan meliputi realisasi PAD, Dana DBHP, DBHBP, dan DAU masing-masing daerah per tahun anggaran.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini sebagai berikut. DAU adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penelitian ini, DAU diukur sebagai proporsi realisasi DAU terhadap total pendapatan daerah

PAD adalah pendapatan dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam penelitian ini, PAD diukur sebagai proporsi realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam satuan persentase.

DBHP adalah bagian dari penerimaan pajak pusat yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan penerimaan daerah, meliputi PBB, BPHTB, serta PPh. Dalam penelitian ini, DBHP diukur sebagai proporsi realisasi DBHP terhadap total pendapatan daerah.

DBHBP adalah bagi hasil dari penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam, seperti pertambangan, kehutanan, dan perikanan, yang dibagikan kepada daerah penghasil. Dalam penelitian ini, DBHBP diukur sebagai proporsi realisasi DBHBP terhadap total pendapatan daerah.

Analisis data dilakukan menggunakan model regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$DAU = \alpha - PAD_{it} - DBHP_{it} - DBHBP_{it} + e \quad (1)$$

Pengujian dilakukan melalui uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh parsial variabel independen, uji simultan (uji F) untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen, serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa besar DAU yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif pada Tabel 2 menggambarkan PAD, DBHP, DBHBP, dan DAU Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2023. Dalam analisis ini, dipaparkan rata-rata, standar deviasi, jumlah observasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel.

Variabel PAD menunjukkan nilai minimum sebesar 0,040 yang berasal dari Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2014, dan nilai maksimum sebesar 0,200 yang dicapai oleh Kabupaten Belitung pada tahun

2017 dan 2018, serta Kota Pangkalpinang pada tahun 2022. Nilai rata-rata PAD sebesar 0,120 atau 12% dari total pendapatan daerah, dengan nilai standar deviasi sebesar 0,043.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	Min	Max	Mean	Std. Deviation	
PAD	70	,040	,200	,120	,043
DBHP	70	,010	,140	,034	,025
DBHBP	70	,020	,210	,079	,043
DAU	70	,370	,630	,500	,057
Valid N	70				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan standar deviasi mengindikasikan bahwa sebaran data PAD antar daerah dan antar tahun relatif homogen, artinya tidak terdapat kesenjangan yang terlalu ekstrem dalam kontribusi PAD antar pengamatan. Namun demikian, rentang antara nilai minimum (4%) dan nilai maksimum (20%) yang cukup lebar mencerminkan adanya perbedaan kapasitas PAD yang nyata antar daerah. Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi PAD sebesar 12% masih tergolong rendah dan mencerminkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mampu memaksimalkan potensi pendapatan daerahnya secara optimal.

Variabel DBHP memiliki nilai minimum sebesar 0,010 yang berasal dari Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung pada tahun 2020, serta nilai maksimum sebesar 0,140 yang dicapai oleh

Kabupaten Bangka pada tahun 2020, 2022, dan 2023. Nilai rata-rata DBHP sebesar 0,034 atau hanya 3,4% dari total pendapatan daerah, dengan standar deviasi sebesar 0,025.

Rata-rata kontribusi DBHP yang hanya sebesar 3,4% merupakan yang paling rendah di antara seluruh variabel dalam penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa basis perpajakan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat terbatas, sehingga bagi hasil pajak pusat belum menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Nilai standar deviasi sebesar 0,025 yang mendekati nilai rata-rata juga menunjukkan variasi antar daerah yang cukup tinggi secara relatif, yang berarti terdapat ketimpangan penerimaan DBHP yang cukup mencolok antara daerah dengan basis pajak yang kuat seperti Kabupaten Bangka, dibandingkan dengan daerah yang basis pajaknya lemah. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa struktur penerimaan daerah di Bangka Belitung masih sangat bergantung pada transfer non-pajak dan Dana Alokasi Umum.

Variabel DBHBP memiliki nilai minimum sebesar 0,020 yang berasal dari Kota Pangkalpinang pada tahun 2014, dan nilai maksimum sebesar 0,210 yang dicapai oleh Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2022. Nilai rata-rata DBHBP sebesar 0,080 atau 8% dari total pendapatan daerah, dengan standar deviasi sebesar 0,043.

Rentang antara nilai minimum dan maksimum DBHBP yang cukup lebar mencerminkan perbedaan potensi sumber daya alam yang signifikan antar daerah. Kabupaten Belitung Timur yang mencatat nilai DBHBP tertinggi merupakan daerah dengan aktivitas pertambangan yang cukup intensif, sehingga mendapatkan porsi bagi hasil sumber daya alam yang lebih besar. Sebaliknya, Kota Pangkalpinang sebagai pusat perkotaan dengan aktivitas pertambangan yang sangat terbatas mencatat nilai DBHBP yang paling rendah. Meski rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan DBHP, sifat DBHBP yang sangat fluktuatif dan bergantung pada harga komoditas global khususnya timah menjadikannya sumber pendapatan yang tidak dapat diandalkan secara stabil dalam jangka panjang. Nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan standar deviasi menunjukkan penyimpangan data yang masih dalam batas wajar.

Variabel DAU memiliki nilai minimum sebesar 0,370 yang berasal dari Kabupaten Bangka pada tahun 2022, dan nilai maksimum sebesar 0,630 yang berasal dari Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2014. Nilai rata-rata DAU sebesar 0,500 atau 50% dari total pendapatan daerah, dengan standar deviasi sebesar 0,057.

Rata-rata kontribusi DAU sebesar 50% merupakan yang tertinggi di antara seluruh variabel dan secara langsung mencerminkan besarnya ketergantungan fiskal

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap transfer pemerintah pusat. Kondisi ini berbanding terbalik dengan rata-rata PAD yang hanya sebesar 12%, menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat besar antara kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri dengan kebutuhannya untuk membiayai pengeluaran daerah. Nilai minimum DAU sebesar 37% yang diperoleh Kabupaten Bangka pada 2022 sekalipun masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata PAD, yang mengkonfirmasi bahwa bahkan daerah dengan ketergantungan DAU terendah pun masih sangat mengandalkan transfer pusat. Nilai standar deviasi sebesar 0,057 yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap DAU bersifat merata dan konsisten di seluruh daerah sampel, bukan hanya terjadi pada daerah tertentu saja.

Secara keseluruhan, pola deskriptif dari keempat variabel menggambarkan kondisi fiskal yang struktural: dominasi DAU (50%) jauh melampaui kontribusi PAD (12%), DBHBP (8%), dan DBHP (3,4%) secara agregat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal mandiri daerah-daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat terbatas, dan ketergantungan pada dana transfer pusat merupakan realitas fiskal yang dominan dalam periode 2014–2023.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah data residual (kesalahan prediksi) dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak (Sahir, 2022:69).

Tabel 3. Hasil Uji *Kolmogorov Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000
	Std. Deviation	,042
	Absolute	,059
Most Extreme Differences	Positive	,059
	Negative	-,056
Kolmogorov-Smirnov Z		,496
Asymp. Sig. (2-tailed)		,966

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil uji normalitas *kolmogorov smirnov* yang disajikan pada tabel 3, terlihat bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,966, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam model regresi terpenuhi dan memungkinkan untuk melanjutkan uji asumsi klasik lainnya.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan kuat antar variabel bebas yang diukur dengan *VIF* dan *tolerance* (Sahir, 2022). Kriteria dalam menentukan keberadaan multikolinearitas adalah *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolnearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAD	,931	1,074
DBHP	,927	1,079
DBHBP	,866	1,155

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada tabel 4, seluruh variabel independen (PAD, DBHP, dan DBHBP) menunjukkan nilai *VIF* di bawah 10 (Sepuluh) dan nilai *tolerance* di atas 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas yang signifikan dalam model regresi ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah varians residual tidak serupa disemua variabel independen (Sahir, 2022).

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	,029	,007		4,313	,000
PAD	-,039	,038	-,128	-1,020	,311
DBHP	-,031	,074	-,053	-,419	,676
DBHBP	-,026	,045	-,076	-,583	,562

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil heteroskedastisitas yang disajikan pada tabel 5, seluruh variabel independen (PAD, DBHP, dan DBHBP) menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas yang signifikan dalam model regresi ini.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah residual saling terikat antar observasi (Sahir, 2022).

Tabel 6. Hasil Uji Auto Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,706 ^a	,499	,468	,042	1,793

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang ditampilkan pada tabel 6, nilai Durbin-Watson (dw) yang diperoleh adalah sebesar 1,793. Dengan tingkat signifikansi 5 persen, jumlah sampel (n) sebanyak 70, dan jumlah variabel independen (k) 3, nilai batas bawah (dL) dan batas atas (dU) menurut tabel Durbin-Watson adalah masing-masing 1,525 dan 1,703. Sesuai dengan kriteria pengujian, kondisi tidak adanya autokorelasi terjadi apabila nilai DW berada di antara dU dan 4-dU. Dalam konteks ini, nilai DW sebesar 1,793 berada di dalam rentang $1,703 < 1,793 < 2,297$ (hasil dari $4 - 1,703$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengandung gejala autokorelasi.

Uji Hipotesis

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,646	,021		30,832	,000
1 PAD	-,629	,124	-,478	-5,081	,000
DBHP	-,539	,216	-,235	-2,494	,015
DBHBP	-,653	,131	-,488	-5,005	,000

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada tabel 7, diperoleh nilai konstanta (nilai α) sebesar 0,646 dan nilai β PAD yaitu -0,629, β DBHP yaitu -0,539, serta β DBHBP yaitu -0,653. Dengan demikian, diperoleh persamaan regresi linier berganda yakni:

$$DAU = 0,646 - 0,629 PAD_{it} - 0,539 DBHP_{it} - 0,653 DBHBP_{it} + e \quad (2)$$

Berdasarkan persamaan hasil regresi linier berganda yang disajikan, maka pengaruh variabel independen terhadap dependen yakni sebagai berikut. Nilai konstanta yaitu 0,646 mengindikasikan bahwa DAU akan memiliki dasar sebesar 0,646 apabila PAD, DBHP, dan DBHBP bernilai nol. Nilai koefisien konstanta yang positif, menunjukkan bahwa DAU cenderung mengalami peningkatan jika nilai dari PAD, DBHP, dan DBHBP sangat mendekati nol.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap DAU, dengan nilai t hitung sebesar -5,081 dan koefisien regresi sebesar -0,629 pada tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya, setiap kenaikan satu poin kontribusi PAD terhadap

total pendapatan daerah akan diikuti oleh penurunan proporsi DAU sebesar 0,629 poin.

Temuan ini sepenuhnya konsisten dengan logika *fiscal federalism theory* yang dikemukakan oleh (Musgrave & Musgrave, 2012). Dalam kerangka teori tersebut, pemerintah pusat berperan sebagai penyeimbang ketimpangan fiskal antar daerah melalui mekanisme transfer vertikal. DAU dirancang bukan sebagai pendapatan tetap, melainkan sebagai instrumen pemerataan yang besarnya ditentukan oleh celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal suatu daerah.

Ketika PAD suatu daerah meningkat, kapasitas fiskalnya menguat, sehingga celah fiskal menyempit dan pemerintah pusat secara otomatis mengalokasikan DAU yang lebih kecil ke daerah tersebut. Mekanisme inilah yang secara empiris tercermin dari koefisien negatif pada hasil penelitian ini.

Dari perspektif kebijakan, temuan ini mengonfirmasi bahwa formula alokasi DAU sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 bekerja sesuai dengan desain awalnya daerah yang mampu menghasilkan pendapatan sendiri akan mendapatkan subsidi pusat yang lebih kecil. Namun demikian, mekanisme ini memunculkan persoalan kebijakan yang kritis: apakah penurunan DAU yang terjadi sebanding dengan peningkatan PAD yang dicapai?. Jika pengurangan DAU lebih besar dari tambahan PAD yang diperoleh, maka

daerah secara neto justru mengalami kerugian fiskal akibat upaya meningkatkan kemandirian pendapatannya sendiri. Kondisi ini dikenal sebagai disinsentif fiskal, yakni situasi di mana daerah tidak memiliki insentif yang cukup untuk mengoptimalkan PAD karena setiap peningkatan PAD akan "dihukum" dengan pengurangan DAU dari pusat (Alexeev & Mamedov, 2017). Fenomena ini berpotensi memperlemah motivasi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam menggali sumber pendapatan mandiri dan pada akhirnya memperpanjang ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Fatimah et al., 2020) yang menyatakan bahwa PAD merupakan faktor yang mempengaruhi belanja daerah, namun dengan catatan bahwa ketergantungan terhadap DAU tetap dominan di sebagian besar daerah.

Hasil pengujian pengaruh DBHP menunjukkan pengaruh negatif terhadap DAU, dengan nilai t hitung sebesar -2,494 dan koefisien regresi sebesar -0,539 pada tingkat signifikansi $0,015 < 0,05$. Artinya, setiap kenaikan 1 persen kontribusi DBHP terhadap total pendapatan daerah akan diikuti oleh penurunan proporsi DAU sebesar 0,539 persen.

Dalam kerangka *fiscal federalism theory*, DBHP merupakan bagian dari kapasitas fiskal daerah yang diperhitungkan dalam formula celah fiskal. Sebagaimana

PAD, peningkatan DBHP yang diterima suatu daerah mengindikasikan bahwa daerah tersebut memiliki basis perpajakan yang lebih kuat baik melalui PBB, BPHTB, maupun Pendapatan daerah yang lain sehingga pemerintah pusat menilai kapasitas fiskal daerah tersebut telah menguat dan mengurangi alokasi DAU secara proporsional. Mekanisme ini mencerminkan prinsip redistribusi vertikal dalam desentralisasi fiskal, di mana dana pusat diprioritaskan bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal paling terbatas.

Dari sisi kebijakan, perlu dicermati bahwa penerimaan DBHP sifatnya tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah daerah, karena besarnya ditentukan oleh kebijakan perpajakan pusat dan realisasi penerimaan pajak nasional.

Dengan demikian, pengurangan DAU yang diakibatkan oleh peningkatan DBHP sebenarnya bukan semata-mata hasil dari upaya fiskal daerah itu sendiri, melainkan konsekuensi dari kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keadilan formula alokasi DAU: apakah adil jika daerah DAU dikurangi atas peningkatan bagi hasil pajak yang sesungguhnya bersumber dari kebijakan pusat? Kondisi ini memperkuat urgensi untuk meninjau kembali komponen kapasitas fiskal dalam formula DAU agar lebih mencerminkan upaya fiskal aktual daerah,

bukan sekadar total penerimaan yang sebagiannya bersifat pasif.

Hasil pengujian selanjutnya menunjukkan bahwa DBHBP berpengaruh negatif terhadap DAU, dengan nilai t hitung sebesar -5,005 dan koefisien regresi sebesar -0,653 pada tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Koefisien ini merupakan yang terbesar di antara ketiga variabel independen, yang berarti DBHBP memiliki pengaruh paling dominan dalam menekan alokasi DAU yang diterima daerah.

Besarnya koefisien negatif DBHBP dapat dipahami melalui konteks spesifik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Dalam *fiscal federalism theory*, daerah yang kaya sumber daya alam dan menerima bagi hasil sumber daya alam yang besar dianggap memiliki kapasitas fiskal yang tinggi, sehingga celah fiskalnya dinilai lebih kecil dan DAU yang dialokasikan pun berkurang secara signifikan. Pemerintah pusat menggunakan logika bahwa daerah penghasil sumber daya alam seharusnya mampu membiayai kebutuhannya sendiri dari hasil pengelolaan kekayaan alamnya.

Namun, temuan ini justru menyingkap persoalan kebijakan yang lebih dalam. DBHBP bersifat sangat fluktuatif karena sangat bergantung pada harga komoditas global dan regulasi pemerintah pusat terkait kuota produksi dan ekspor. Ketika harga timah sedang tinggi dan DBHBP melonjak,

DAU yang diterima daerah akan tergerus. Sebaliknya, ketika harga komoditas turun dan DBHBP menyusut, daerah berada dalam posisi sulit karena kapasitas fiskal tiba-tiba melemah sementara DAU tidak serta-merta meningkat secara proporsional dalam waktu singkat. Kondisi ini menciptakan risiko fiscal volatility yang serius bagi stabilitas anggaran daerah, khususnya bagi Kabupaten/Kota yang sangat mengandalkan sektor pertambangan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa komponen DBHBP perlu diperlakukan secara berbeda dalam formula DAU misalnya dengan menggunakan rata-rata penerimaan DBHBP beberapa tahun sebelumnya sebagai dasar perhitungan kapasitas fiskal, alih-alih menggunakan realisasi tahun berjalan yang sangat rentan terhadap gejolak harga komoditas.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) merupakan pengujian yang digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelayakan model regresi secara keseluruhan.

Tabel 8. Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,103	3	,034	18,501	,000 ^b
1 Residual	,122	66	,002		
Total	,225	69			

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang disajikan pada tabel 8, menunjukkan bahwa nilai signifikansi yakni 0,000 dan nilai F_{hitung} 18,501. Dengan demikian nilai F_{hitung} yakni $18,501 > F_{tabel}$ sebesar 2,740. Kemudian, nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga model regresi ini memenuhi syarat untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak, yang mengindikasikan adanya pengaruh simultan variabel PAD, DBHP, dan DBHBP terhadap DAU.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen secara simultan mampu menjelaskan variasi atau perubahan pada variabel dependen. Nilai R^2 yang rendah (mendekati 0) mengindikasikan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen relatif kecil.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,676 ^a	,457	,432	,043

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang disajikan pada tabel 9, menunjukkan bahwa nilai Adjusted R^2 yakni 0,432, sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh dari variabel PAD,

DBHP, dan DBHBP terhadap DAU sebesar 0,432 atau 43,2 persen dan kemudian sisanya yakni sebesar 56,8 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Sesuai dengan hasil analisis dan pembahasan yang dipaparkan, maka disimpulkan beberapa hal yaitu:

Variabel PAD berpengaruh negatif terhadap DAU Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2023. Hal tersebut memperlihatkan bahwa semakin tinggi PAD suatu daerah maka akan semakin rendah DAU yang akan diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah.

Variabel DBHP berpengaruh negatif terhadap DAU Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2023. Hal tersebut memperlihatkan bahwa semakin tinggi DBHP suatu daerah maka akan semakin rendah DAU yang akan diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah.

Variabel DBHBP berpengaruh negatif terhadap DAU Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2023. Hal tersebut memperlihatkan bahwa semakin tinggi DBHBP suatu daerah maka akan semakin rendah DAU yang akan diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah.

Secara keseluruhan, hasil pengujian di atas memberikan konfirmasi empiris yang kuat bahwa mekanisme *fiscal gap* dalam

formula DAU bekerja sebagaimana dirancang daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih tinggi menerima DAU yang lebih kecil. Hal ini selaras dengan prinsip pemerataan fiskal dalam *fiscal federalism theory*. Namun demikian, temuan ini sekaligus mengungkap persoalan kebijakan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menyadari adanya limitasi dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa saran sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang relevan yaitu:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi PAD, DBHP, dan DBHBP secara berkelanjutan melalui perbaikan sistem pajak dan retribusi daerah, peningkatan kinerja BUMD, serta pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan efisien. Upaya ini penting agar daerah tidak terlalu bergantung pada DAU dan mampu memenuhi kebutuhan pembangunan secara mandiri.
2. Pemerintah pusat perlu menyempurnakan kebijakan alokasi DAU agar lebih mencerminkan kapasitas fiskal riil daerah, serta memberikan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan sendiri. Selain itu,

dibutuhkan transparansi dalam perhitungan celah fiskal dan pemerataan distribusi dana untuk mendorong keadilan fiskal antardaerah.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan komponen kebutuhan fiskal dalam formula perhitungan DAU. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan akan lebih holistik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya alokasi DAU yang diterima oleh daerah. Selain itu, disarankan untuk memperluas objek penelitian..

DAFTAR PUSTAKA

- Alexeev, M., & Mamedov, A. (2017). Factors determining intra-regional fiscal decentralization in Russia and the US. *Russian Journal of Economics*, 3(4), 425–444. <https://doi.org/10.1016/j.ruje.2017.12.007>
- Chowdhury, A. R., & Murshed, S. M. (2016). Conflict and fiscal capacity. *Defence and Peace Economics*, 27(5), 583–608. <https://doi.org/10.1080/10242694.2014.948700>
- Citra, C. K. B., & Jatmiko, B. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten & Kota di DIY 2010-2016). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 121–130. <https://doi.org/10.18196/rab.010211>
- DJPK. (2025). *Data APBD*. Data APBD. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>, diakses pada 13 April 2025 pukul 10.00 WIB.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah* (3rd ed.). Salemba.
- Istiqomah, U. N., & Ismanto, H. (2025). *Pengaruh Capital Expenditure , Sales Growth , Revaluation Fixed Asset dan Leverage terhadap Kinerja Perusahaan Transportasi*. 05(01), 315–325.
- Meidina, C., Anggita, W., & Vehtasvili, V. (2018). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012-2016. 12(2), 149–163. [http://repository.ubb.ac.id/1957/%0Ahttp://repository.ubb.ac.id/1957/1/HALAMAN DEPAN.pdf](http://repository.ubb.ac.id/1957/%0Ahttp://repository.ubb.ac.id/1957/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf)
- Musgrave, R., & Musgrave, P. (2012). Fiscal policy for economic growth. In *Economists' Voice* (Vol. 9, Issue 2). <https://doi.org/10.1515/1553-3832.1898>
- Nasrun, A., & Murni Handayani, S. H. (2024). The Impact of the flypaper effect on the Province of Bangka Belitung in the Context of Spatial Relationships. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 11(2), 24–32. <https://doi.org/10.33019/equity.v11i2.194>
- Rahmadoni, F., Safitri, M., Suparlan, S., Reniati, R., Rahayu, R. L., & Ridwan, M. Q. (2022). The Mapping of Regional Tax and Levy in Pangkalpinang. *Jurnal Bina Praja*, 14(2), 301–313. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.301-313>
- Rahmasari, T. F., Darmastuti, D., & Nurrahman, K. A. (2024). Local Finance and Regional Expenditures : Is There a Flypaper Effect in Indonesia ? *KnE Social Sciences*, 2024(3), 62–84.

<https://doi.org/10.18502/kss.v9i20.16474>

Ridho, M. A. M. (2021). *Bagi, Dana Pajak, Hasil Pertumbuhan, D A N Terhadap, Ekonomi Pendapatan, Ketimpangan*.
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/43969/18313067.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia.